

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan terhadap item per item soal yang diberikan pada kuisioner pada bab sebelumnya terhadap penerapan PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran dan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran

Penerapan PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran pada Pemprop Jabar atas Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan sudah sangat baik, namun dalam beberapa hal masih terdapat yang belum sesuai dengan PSAP No.02. Pemahaman mereka terhadap PSAP No.02 sudah tergolong baik.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil atas penerapan PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Dilihat dari struktur laporan, Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemprop Jabar sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pada PSAP N0.02. Unsur-unsur yang dalam Struktur Laporan meliputi nama entitas, cakupan entitas pelaporan sudah tersaji dengan baik dan untuk periode pelaporan, mata uang yang digunakan dan satuan angka yang digunakan sudah tersaji dengan sangat jelas.
2. Dilihat dari periode pelaporan, hasil perhitungan menggambarkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan Pemprop Jabar sudah

memperhatikan periode pelaporan sesuai dengan PSAP No.02. Laporan selalu disajikan minimal satu kali dalam setahun. Disamping itu Pemprop Jabar juga sudah melaksanakan penyajian laporan secara triwulanan.

3. Dilihat dari ketepatan waktu, Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan Pemprop Jabar sudah memperhatikan ketepatan waktu, akan tetapi dalam kenyataannya keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dalam pelaporan juga pernah terjadi. Kendatipun demikian Pemprop Jabar juga selalu memberikan fakta yang jelas perihal keterlambatan tersebut.
4. Dilihat dari isi laporan, Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan sudah sesuai dengan standar yang terdapat dalam PSAP No.02. Pengklasifikasian pendapat dan belanja sudah tersaji dengan baik pada isi laporan. Hal-hal lain dalam laporan realisasi anggaran juga selalu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sudah tercermin dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemprop Jabar. Dilihat dari pemahaman para personil di Biro keuangan Pemprop Jabar atas transparansi dan akuntabilitas, menggambarkan bahwa para personil sudah memahami dengan sangat baik maksud dari transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi pemerintahan, hasil perhitungan menggambarkan bahwa setiap personil

instansi sudah cukup memahami tugas dan wewenangnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Pelaksanaan jalur komando birokrasi dijalankan dengan baik dalam segala aktivitas instansi.

2. Dilihat dari ketersediaan sistem informasi bagi publik, Pemprop Jabar telah memperhatikan hal tersebut dengan baik. Salah satu media informasi yang tersedia adalah situs resmi yang dimiliki oleh Pemprop Jabar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Disamping itu instansi juga memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung dengan baik dan terbuka.
3. Dilihat dari sistem anggaran yang terbuka, menggambarkan bahwa Pemprop Jabar memberikan keterbukaan dalam pelaksanaan anggarannya dengan baik. Setiap personil instansi cukup mengetahui kondisi anggaran pada instansinya. Pemprop Jabar juga menyajikan laporan atas pelaksanaan anggaran kepada masyarakat melalui media cetak.
4. Dilihat dari adanya lembaga independen yang mengawasi pemerintahan, keberadaan lembaga tersebut sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hasil perhitungan menggambarkan bahwa keberadaan lembaga tersebut dinilai sudah memadai untuk terlaksananya pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan atas penerapan PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran serta pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat adalah:

1. Dalam penerapan suatu Standar Akuntansi Pemerintahan hendaknya perlu adanya suatu pengarahan kepada setiap personil mengenai pelaksanaan hal tersebut karena tidak setiap personil akan dengan mudah untuk memahami penerapan suatu hal yang baru.
2. Berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan, ternyata masih terdapat responden yang menyatakan bahwa adanya keterlambatan dalam pelaporan, untuk itu maka diharapkan untuk ke depannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaporan.
3. Dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas perlu adanya penyempurnaan dalam segi media informasi publik, karena media informasi yang ada selama ini dirasakan masih kurang memberikan informasi yang jelas dan terbaru. Informasi yang disajikan hendaknya meliputi semua aktivitas instansi mulai dari profil sampai dengan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran.